

RINGKASAN

Muhammad Hindun Solihin, 2023, Kepemimpinan Religius Dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) (Studi Kasus Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo), Siti Marwiyah, Renny Candradewi Puspitarini, 199 hal+ xii.

Pemimpin memiliki amanah untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan posisi dan jabatannya, serta mengikuti regulasi yang berlaku. Kepemimpinan juga berhubungan dengan latar belakang pemahaman akan agama sehingga dalam pengambilan kebijakan disertai nilai agama maka terwujud kepemimpinan religius. Fenomena yang berkaitan dengan model kepemimpinan religius dan kebijakan adalah fenomena terkait ijin keberadaan tempat hiburan. Seperti di Kota Probolinggo yang juga mengeluarkan kebijakan ijin tempat hiburan diterbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan. Hal ini menarik untuk diteliti, terutama dengan teori lima dimensi, menurut (Huber & Huber, 2012) meliputi *ideology; intellectual; public practice; private practice; religious experience* .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan antara teori dengan temuan di lapangan terkait kebijakan publik penutupan tempat hiburan (karaoke) dengan kepemimpinan Walikota Probolinggo yang memiliki nilai agama serta untuk mengetahui kepemimpinan pemimpin daerah Kota Probolinggo dengan model religius dalam menangani tempat hiburan karaoke.

Data pada penelitian ini berfokus pada kepemimpinan religius Walikota Probolinggo dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan teori dan model implementasi kebijakan publik Generasi III (Hybrid) dengan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kepemimpinan Walikota Probolinggo periode 2019-2024 menjalankan kebijakan penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo. Pada kebijakan tersebut tergambar model kepemimpinan religius. Intinya mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan prinsip demokrasi serta berkaitan dengan pemahaman agama oleh Walikota Probolinggo. Serta ada pelanggaran Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan. Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan satu agama, tetapi untuk kerukunan umat beragama. Tidak hanya masyarakat Islam yang beranggapan buruk pada tempat karaoke, tetapi agama lain juga.

Kata Kunci: kepemimpinan, kebijakan publik, religius, ijin tempat hiburan

SUMMARY

Muhammad Hindun Solihin, 2023, Religious Leadership in the Implementation of the Closing of Entertainment Places (Karaoke) (Case Study of the Mayor's Policy of Closing Entertainment Places (Karaoke) in Probolinggo City), Siti Marwiyah, Renny Candradewi Puspitarini, 199 things+ xii.

Leaders have the mandate to carry out their obligations in accordance with their position and title, and follow applicable regulations. Leadership is also related to a background in understanding religion so that in making policies accompanied by religious values, religious leadership is realized. The phenomenon related to the model of religious leadership and policy is the phenomenon related to the permit for the existence of entertainment venues. As in the City of Probolinggo, which also issued a permit policy for entertainment venues, a Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Arrangement, Supervision and Control of Entertainment Venue Businesses was issued. This is interesting to study, especially with the five-dimensional theory, according to (Huber & Huber, 2012) includes ideology; intellectuals; public practice; private practice; religious experience .

The purpose of this study is to explain the difference between theory and findings in the field regarding public policy on closing entertainment venues (karaoke) with the leadership of the Mayor of Probolinggo who has religious values and to find out the leadership of the regional leaders of Probolinggo City with a religious model in handling karaoke entertainment venues.

The data in this study focuses on the religious leadership of the Mayor of Probolinggo in implementing policies according to the theory and model of Public Policy Implementation Generation III (Hybrid) using purposive sampling based on certain criteria. The research method used is a quantitative descriptive method. Research data obtained through observation, interviews.

The results of this study show that the Probolinggo Mayoral Leadership for the 2019-2024 period implemented a policy of closing karaoke pub in Probolinggo City. The policy illustrates a model of religious leadership. In essence, the mechanism for closing karaoke pub applies democratic principles and is related to the understanding of religion by the Mayor of Probolinggo. As well as violations of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Arrangement, Supervision and Control of Entertainment Venue Businesses. This policy does not only benefit one religion, but for religious harmony. It's not only the Islamic community that thinks badly of karaoke pub, but other religions as well.

Keyword: leadership, public policy, religion, entertainment venue permits